



Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Habif Fitra Novyan¹, Rahmadani Yusran^{2*}, Desyandri Desyandri³

^{1,2}*Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, 25131*

³*Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, 25131*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24/10/2024

Revised 21/11/2024

Accepted 25/11/2024

Abstract

Students from the Faculty of Social Sciences, Padang State University who take part in the MBKM program are the focus of this research which aims to analyze the implementation of MBKM program policies. This research specifically uses a qualitative descriptive approach. Interviews and documentation are the data collection tools used in this research. Data analysis includes data reduction methods, data presentation, and conclusion tracing. This research uses Grindle theory. which shows that the success of policy implementation is very dependent on existing interests. Based on research results, there are several MBKM programs that are participated in by social sciences faculty students as follows: Independent Student Exchange (PMM), Teaching Campus (KM), Indonesian International Mobility Awards (IISMA), Internships/Work Practices, aspects that help and hinder implementation MBKM program for students at the Faculty of Social Sciences, Padang State University.

Keywords: *Implementation of the MBKM Program, Faculty of Social Sciences, Padang State University*

Abstrak

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang mengikuti program MBKM menjadi fokus penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program MBKM. Penelitian ini khusus menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. wawancara dan dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini . Analisis data meliputi metode reduksi data, penyajian data, dan penelusuran kesimpulan . penelitian ini menggunakan teori grindle. yang mana menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kepentingan yang ada . berdasarkan hasil penelitian , terdapat beberapa program MBKM yang di ikuti oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial sebagai berikut Pertukaran Mahasiswa Merdeka(PMM), Kampus Mengajar (KM), Indonesian International Mobility Awards (IISMA), Magang/ Praktik kerja, aspek yang membantu dan menghambat pelaksanaan program MBKM pada mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negeri padang.

Kata Kunci: Implementasi Program MBKM, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Penulis Korespondensi

E-mail : yusranrdy@fis.unp.ac.id



PENDAHULUAN

Untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan masyarakat yang semakin pesat, budaya kerja dan kemajuan teknologi, keterampilan siswa harus lebih selaras dengan kebutuhan zaman. Terhubung tidak hanya dengan dunia industri dan dunia kerja, namun juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai hasil pembelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus menjadi jawaban atas permintaan tersebut. Kampus Merdeka merupakan salah satu bentuk pembelajaran pada perguruan tinggi yang bersifat otonom dan fleksibel untuk menciptakan budaya belajar yang inovatif, tidak membatasi dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program pokoknya adalah: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kenyamanan perguruan tinggi negeri. menjadi badan hukum PTN, dan hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Mahasiswa mempunyai kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang berarti 1 semester kesempatan mengikuti mata kuliah di luar program studi dan 2 semester untuk melaksanakan kegiatan mengajar di luar fakultas. harus mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang selaras dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia komersial dan industri, serta dinamika

masyarakat.(Kemendikbudristek, 2020).

Kebijakan Kegiatan Mandiri Kampus Belajar (MBKM) diatur dalam Peraturan Menteri Kemendikbud No 03 tahun 2020 menetapkan pembelajaran pada perguruan tinggi berlangsung di dalam kurikulum dan di luar program studi.(Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020 Tentang SN-Dikti, 2020). Alasan pemerintah mengambil kebijakan merdeka belajar di kampus adalah untuk mendorong perguruan tinggi agar lebih mudah beradaptasi. Mempercepat inovasi. Hilangkan paradigma tersebut, pendidikan hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Mengembangkan pembelajar yang lebih adaptif.(Projo, 2020).

Tujuan dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 ini memperjelas bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan lulusan yang dibutuhkan bangsa dan negara dalam hal soft skill dan teknik kompetensi bagi peserta yang berpartisipasi di dalamnya. aktivitas dan dari kegiatan ini mereka dapat mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang unggul dan berbakat berkepribadian. Dengan program pembelajaran berdasarkan pengalaman. Siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya siswa. (Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020 Tentang SN-Dikti, 2020).

Program MBKM ini memiliki manfaat bagi mahasiswa sebagai berikut, yaitu mendapatkan banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya selama menempuh pendidikan di program studi terapan universitas. Keunggulan MBKM bagi perguruan tinggi adalah diperolehnya keterampilan profesional khusus dan soft skill yang

penting untuk memasuki masyarakat informasi dan industri 4.0. Keunggulan MBKM bagi guru adalah meningkatkan keterampilan mengajar dan penguasaan materi. konten pembelajaran.

Program MBKM yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 ini banyak diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi Indonesia, baik negeri maupun swasta. Namun mahasiswa masih menemui banyak kendala ketika melaksanakan program MBKM. Pertama, mahasiswa Universitas Widyagama Malang kesulitan mengenali catatan perkuliahan. Dua dana yang diterima mahasiswa dari pemerintah melalui LPDP selama kegiatan MBKM tidak mampu menutupinya kegiatan MBKM yang diikuti oleh siswa (Cakrawala & Halim, 2021).

Namun mahasiswa masih banyak menemui kendala dalam melaksanakan program MBKM di STKIP Yapis Dompu. Kesulitan yang mereka alami pertama kali dalam mengikuti program MBKM adalah karena kurangnya materi pembelajaran pada sistem penerapan e-learning. Kedua, kesulitan dalam mengadaptasi program MBKM dengan kurikulum kampus dan pengaturan konversi nilai (Nurwadahnia, 2023).

Program MBKM Universitas Syiah Kuala adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kesalahan pada sistem pembelajaran daring yang digunakan mahasiswa selama perkuliahan. Kedua, kurangnya bimbingan dari MBKM Universitas Syiah Kuala kepada calon mahasiswa mengenai penguasaan mata kuliah. Ketiga, biaya pelaksanaan program kesiswaan juga memerlukan pendanaan, yaitu siswa menanggung biaya pengelolaan program dan sekolah tidak menanggung biayanya.

koordinasi program keempat yang dipimpinnya. Hal ini merupakan mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang mengeluh kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh koordinator utama dan tidak menemukan solusi (Wahyu Sunandayani & Mislinawati, 2023).

Namun program MBKM yang dilaksanakan sejak tahun 2021 di beberapa perguruan tinggi di Sumbar masih menemui kendala. Salah satunya di Universitas Negeri Padang. Pertama, kurangnya sosialisasi antara pimpinan universitas dengan dekan, dosen, dan mahasiswa. Kedua, kesulitan dalam mengenali nada-nada tersebut. Ketiga, perubahan status UNP menjadi WCU (Word Class University). (Hardi et al., 2023).

Rekognisi merupakan suatu proses pembelajaran yang berujung pada kredit atau pengakuan. Siswa mempunyai kebebasan untuk mengikuti beberapa kegiatan pembelajarannya di luar program studi, baik di dalam maupun di luar sekolah menengah atas. Kegiatan-kegiatan ini diakui sebagai bagian dari SKS akademik yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. (Kemendikbudristek, 2024).

Rekognisi dalam konteks ini penting karena pertama berkat fleksibilitas pembelajaran, mahasiswa mempunyai kesempatan belajar di luar program studinya sehingga dapat memberikan pengalaman praktik dan paparan kurikulum yang lebih luas, kedua . mengembangkan keterampilan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan profesional masa depan. ketiga, integrasi *experiential learning* yang diperoleh dari Kegiatan di luar kampus diintegrasikan ke dalam program akademik mahasiswa

sehingga pembelajaran menjadi lebih utuh. Empat penghargaan kegiatan kemajuan pembelajaran. Program MBKM dirancang untuk meningkatkan dan memperkuat keterampilan yang seharusnya menjadi bagian dari kemajuan belajar siswa dan berujung pada pengakuan.(Kemendikbudristek, 2024).

Salah satu PTN yang menyelenggarakan program MBKM adalah Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini, program MBKM yang diikuti mahasiswa dapat dikenali dari nilai dan SKS yang diperoleh dari program studi asal(Peraturan Rektor UNP Tentang MBKM, 2021).

Program MBKM yang dapat diakui gelar dan SKSnya oleh UNP adalah sebagai berikut: Pertama, pertukaran mahasiswa antar program studi di luar UNP. Pertukaran pelajar merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah/semester di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri secara daring atau luring. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan yang dilakukan Universitas Negeri Padang/Fakultas/Program Studi dengan mitra PT/Fakultas/Prodi yang dituangkan dalam dokumen kerjasama (MOU/PKS). latihan kedua/ praktik kerja. dalam hal ini peningkatan keterampilan lulusan berupa pengalaman kerja bagi mahasiswa, sehingga perolehan pengalaman yang relevan dengan bidang keilmuannya diakui menggunakan bentuk hybrid sesuai dengan ketentuan studi program gelar dengan maksimal. berbobot 20 SKS, yang ketiga asisten pengajar pada satuan pendidikan, merupakan kegiatan mengajar pembantu yang dilaksanakan oleh peserta didik pendidikan formal baik dasar maupun menengah, kegiatan ini dapat menjadi alat bantu mengajar. Pengakuan

menurut bentuk Hybrid sesuai dengan ketentuan program studi dengan bobot maksimal 20 SKS, Penelitian/penelitian keempat. merupakan kegiatan program Merdeka Belajar di kampus merdeka ini bagi yang berminat dan berminat menjadi sarjana. Penelitian/penelitian ini dapat dikonversi menjadi gelar dengan menggunakan bentuk hybrid sesuai dengan persyaratan program studi dengan bobot maksimal 20 SKS. Kelima proyek kemanusiaan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa UNP untuk melaksanakan kegiatan. Kemanusiaan untuk mengurangi dampak bencana. Konversi kegiatan kemanusiaan ini menggunakan bentuk hybrid dengan bobot maksimal 20 SKS, program kewirausahaan yang keenam merupakan kemajuan dalam realisasi, kreasi, inovasi suatu kegiatan komersial. Kegiatan program bisnis tersebut dapat ditransformasikan ke dalam bentuk hybrid dengan bobot maksimal 20 SKS, dalam tujuh topik tematik kerja nyata, suatu bentuk program MBKM yang memberikan mahasiswa pengalaman hidup yang luar biasa di masyarakat. Aktivitas KKN-T ini dapat dikonversi melalui bentuk hybrid sesuai ketentuan program studi dengan bobot 20 sampai dengan 40 SKS.(Peraturan Rektor UNP Tentang MBKM, 2021).

Permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi pengelola program MBKM adalah sebagai berikut: Pertama, belum dilakukannya konversi, dalam hal ini masih banyak perguruan tinggi yang belum melakukan konversi nilai mahasiswa. Nilai program MBKM belum diproses dan tidak dapat dijadikan nilai untuk digunakan pada akhir semester. Kedua universitas tersebut masih beradaptasi dengan program MBKM. Ini adalah program baru bagi

universitas yang harus disetujui oleh universitas. melakukan penyesuaian dan persiapan yang matang untuk memastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik. ketiga, mereka tidak mengetahui proses pengenalan derajat. Dalam hal ini perguruan tinggi tidak dapat sepenuhnya mengakui nilai yang dihasilkan mahasiswa selama proses MBKM. Keempat kesalahan pengelolaan konversi nilai dalam hal ini merupakan permasalahan yang sangat sensitif bagi perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan MBKM dimana perguruan tinggi belum memahami cara melakukan konversi tersebut.(Mayang Seprilla, 2022).

Penyelenggaraan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang juga menemui kendala dalam pelaksanaan program MBKM. Beberapa permasalahan yang dihadapi mahasiswa adalah: Pertama, mahasiswa mengalami kendala dalam mengikuti program MBKM terutama dari segi aturan konversi gelar, kurangnya sosialisasi dan lambatnya pemberian dana bantuan hidup. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kegiatan MBKM yang ditawarkan fakultas kepada kepala departemen Fakultas Ilmu Sosial, dosen, mahasiswa. Sosialisasi mengenai kegiatan MBKM telah dilakukan secara intensif dan masif oleh MBKM Universitas Negeri Padang kepada pimpinan fakultas, ketua jurusan, kepala labor dan mahasiswa se-FIS UNP yang dilakukan secara berkala melalui pertemuan Zoom dan YouTube sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kepala departemen, kepala labor dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNP terkait dengan pelaksanaan kegiatan MBKM. Departemen dan program gelar juga mengalami kesulitan dalam mengkonversi nilai dari mata kuliah

yang dipilih mahasiswa ke mata kuliah yang tersedia di departemen dan program gelar selama semester berjalan. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) agar nilai yang dikonversi kemudian relevan antara kampus tujuan dan kampus asal. Ketiga, pembaca masih belum memiliki sistem dan regulasi yang jelas. melakukan konversi nilai. Hal ini disebabkan belum adanya sistem pengetahuan dan informasi yang terintegrasi untuk mengkonversi mata kuliah. Pengalihan gelar akan dilakukan oleh departemen dalam hal ini oleh ketua departemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan memenuhi syarat sebagai berikut, dengan mengirimkan bukti laporan pengesahan keikutsertaan dalam MBKM. kegiatan selama enam bulan dan mengadakan diskusi dengan kepala Departemen dengan mahasiswa mengenai nilai yang akan diberikan. mengkonversikan sejumlah 20 SKS dari kampus tujuan ke kampus asal sehingga nilai konversi tersebut nantinya disetujui oleh tim MBKM Departemen.

Fokus penelitian dalam artikel ini adalah Implementasi Program MBKM di lingkungan FIS UNP dan faktor pendukung dan penghambat program MBKM di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNP . Penelitian ini berlokasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25131. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Direkrorat Inovasi Pembelajaran dan MBKM berjumlah 1 orang , Admin Sub direktorat Inovasi pembelajaran dan MBKM Berjumlah 1

orang, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang berjumlah 1 orang, Kepala Departemen Se lingkup FIS UNP berjumlah 5 orang, mahasiswa peserta program MBKM se lingkup Fakultas Ilmu Sosial UNP berjumlah 11 Orang total jumlah populasi berjumlah 19 Orang. Dan sampel yang di gunakan adalah berjumlah 19 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data dan informasi yang dikaji melalui penafsiran intelektualitas dan empiris. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor internal dan eksternal (Puyt et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Grindle dalam (Kasmad, 2018) salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil. Dapat dikatakan bahwa pelaksana program adalah orang yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, sebab pelaksana program merupakan pemberi pelayanan kepada civitas akademika UNP dalam suatu kebijakan publik. Pelaksana program adalah orang yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, sebab pelaksana program merupakan pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam suatu kebijakan publik.

Program MBKM yang di ikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial sebagai berikut.

a) Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)

Pada dasarnya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka itu adalah sebuah program yang dibuat oleh kemendikbudristek untuk mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester di Perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan mahasiswa harus melengkapi syarat untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya PMM seperti mahasiswa itu harus mempersiapkan berkas / syarat yang di minta oleh kemendikbud sebagai berikut mahasiswa berada di semester 3,5,7 dengan IPK 3,00, mengambil mata kuliah 20 SKS baik di kampus asal maupun kampus tujuan. (Kemendikbudristek, 2024).

b) Magang / Praktik Kerja

Program magang / praktik kerja ini adalah sebuah Program yang di gagas/ di inisiasi oleh kemendikbudristek di mana memiliki manfaat dalam memberikan kompetensi industri bagi mahasiswa, memberikan pengalaman dengan tujuan mahasiswa dapat memberikan pengalaman yang cukup di karenakan pembelajaran langsung di tempat kerja. (Kemendikbudristek, 2024).

c) Kampus Mengajar (KM)

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah (PISA 2018) peringkat no 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan Indonesia sangat banyak dan memiliki permasalahan baik di satuan pendidikan non formal dan formal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di lakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan baik di sekolah dasar, menengah, atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di

lokasi kita maupun di daerah terpencil.

Mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar harus mempersiapkan syarat untuk mendaftar di platform MBKM sebagai berikut IPK Minimal 3,00, PTN /PTS yang berada di bawah naungan kemendikbudristek, mahasiswa aktif yang berada di semester 4 pada saat kegiatan berlangsung (Kemendikbudristek, 2024).

d) Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)

IISMA adalah salah satu program unggulan dari delapan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi terbaik luar negeri. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sendiri akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dimana mereka dapat belajar dari praktik terbaik di industri, organisasi kemanusiaan, dan institusi penelitian kelas dunia.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berminat mengikuti IISMA ini di minta memenuhi syarat yang telah ditetapkan kemendikbud sebagai berikut mahasiswa berada di semester 4-6 baik Jenjang Strata 1 maupun Diploma 3 pada saat kegiatan berlangsung (Kemendikbudristek, 2020).

Dilihat dari implementasi kebijakan, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi program MBKM bagi mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, antara lain:

Konversi nilai

Konversi nilai kegiatan MBKM harus mempunyai laporan semester kegiatan MBKM dan mahasiswa disarankan untuk berkonsultasi dengan kepala departemen, Kepala labor, dosen pembimbing akademik (DPA) mahasiswa selingkungan FIS UNP untuk melakukan konversi nilai agar nilai yang diperoleh mahasiswa selama kegiatan keikutsertaan diakui oleh Kepala Departemen selingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNP.

Saat melakukan konversi nilai, beberapa program studi masih mengalami kesulitan terkait proses konversi dan mata pelajaran yang dapat dikonversikan hasil MBKM. Dan nilai yang dapat dikonversikan pada setiap mata kuliah adalah 20 SKS. (Kurniadi et al., 2023).

Proses konversi nilai mengharuskan kurikulum melakukan trial and error untuk menentukan teknik mengubah kegiatan MBKM menjadi kredit mata kuliah. Permasalahan yang dihadapi adalah kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa tidak relevan dengan hasil belajar lulusan dan mata kuliah sehingga proses konversinya agak sulit dari segi nilai (Tandrianingsih & Rohmah, 2023).

Data yang terdapat pada Kajian Implementasi Mbkm mahasiswa, dosen dan mitra program studi Manajemen, Akuntansi dan Teknik Komputer Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyatakan bahwa 13% guru berpendapat bahwa terdapat hambatan dalam konversi kualitas dari kegiatan Mbkm ke kegiatan Mbkm lainnya. Kursus diambil pada semester berjalan. Sebaiknya pengelola MBKM melakukan kegiatan penyadaran

tentang kegiatan MBKM di kalangan mitra, guru, dan siswa, khususnya untuk tugas pokok dan fungsi di tempat magang. (Suryo Budi Santoso*, 2022).

Kurangnya Sosialisasi

Memastikan sosialisasi terkait kegiatan MBKM perlu dilakukan secara intensif dan masif oleh MBKM Universitas Negeri Padang kepada para pimpinan fakultas, ketua jurusan, kepala laboratorium dan mahasiswa seluruh FISIP UNP agar tidak terjadi kesalahpahaman antar ketua jurusan, laboratorium, pemimpin dan pemerintah daerah. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNP akan berpartisipasi setelah melaksanakan kegiatan MBKM. Sosialisasi yang tidak merata tentang MBKM, mulai dari pimpinan fakultas hingga calon mahasiswa peserta program MBKM, mengakibatkan masih sedikitnya mahasiswa yang mengetahui program MBKM karena keterbatasan ketersediaan dokumentasi, kurikulum, pedoman dan prosedur operasional untuk mengikuti MBKM. (Fauziah & Vantissha, 2021).



Gambar 1. Dukungan informasi terhadap strategi MBKM

Berdasarkan data Jurnal persepsi mahasiswa terhadap kegiatan belajar mandiri di kampus disebutkan bahwa 43,58% mahasiswa atau 112 mahasiswa mengetahui informasi tentang kebijakan MBKM melalui kegiatan belajar mandiri secara offline/online yang diselenggarakan oleh PT. Sesuai

dengan kondisi pandemi di Indonesia, saat ini mahasiswa sedang mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh PT mengenai kebijakan MBKM secara online. Juga, hingga 45 Mahasiswa sebanyak 17,51% mendapat informasi mengenai kebijakan MBKM melalui jalur daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Sri Dewi Anggadini et al., 2022).

Sebagian besar mahasiswa mendapatkan informasi tentang MBKM melalui kegiatan penyadaran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Media kedua adalah saluran online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan media ketiga adalah kegiatan penyadaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (La et al., 2022).

Lambatnya Pencairan Dana/ Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa

Pemberian bantuan insentif/pendanaan biaya hidup dalam kaitannya dengan kegiatan MBKM tidak merata karena mahasiswa yang tidak memiliki kartu KIP perguruan tinggi menerima dana yang lebih besar dibandingkan mahasiswa yang memiliki KIP. Secara tidak langsung, mahasiswa KIP akan berhemat dalam hal keuangan. Sebaiknya MBKM melakukan penilaian terhadap dana BBH sehingga dapat dicarikan solusi bagaimana BBH ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan siswa merasa mempunyai cukup uang. disediakan oleh pemerintah selama mengikuti kegiatan MBKM ini.

Apabila mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa mendapat tunjangan hidup bulanan sebesar Rp 1.200.000. dan Menerima bantuan biaya penyangga antigen yang diberikan dengan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kewajiban membuat

laporan bulanan seminggu sekali dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan selama 6 bulan, laporan tersebut diserahkan kepada TTD oleh dosen pembimbing kegiatan MBKM (Abdurahman et al., 2023).

Keterlambatan pemberian dana bantuan biaya hidup di luar agenda diperkirakan akan menjadi kendala bagi mahasiswa migran. Kebijakan masing-masing mitra berbeda-beda dalam hal waktu beraktivitas, tugas dan pengeluaran uang atau biaya hidup. Dalam hal ini kami mahasiswa MBKM mempunyai kegiatan dan membutuhkan dana selama kegiatan berlangsung dan lebih sering terjadi keterlambatan pembayaran uang bantuan hidup karena mahasiswa MBKM harus menyelesaikan formalitas administrasi. dan ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Undamayanti et al., 2022).

Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menyampaikan, sekitar 50.000 mahasiswa mengikuti kegiatan resmi MBKM yang diselenggarakan kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2021. Kedepannya ditargetkan keikutsertaan 150.000 mahasiswa dalam ini. aktivitas kegiatan MBKM. Ini juga akan meningkatkan anggaran sebesar 3 kali lipat dari biaya awal. Anggaran yang lebih besar digunakan untuk menampung uang jajan mahasiswa peserta, yaitu. 2. 5-2. 8 juta per siswa. Ini penting hal tersebut merupakan respon kementerian terhadap permasalahan kurangnya perhatian pemerintah terhadap dana stimulus dan bimbingan mahasiswa. Sebab permasalahan keuangan menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh mahasiswa saat mengikuti program MBKM. (Khoiri Nailurrohman, 2022).

Faktor pendukung dan penghambat implementasi program MBKM di FIS UNP

Faktor Pendukung:

- a) Antusiasme mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial sangat Tinggi terkait Program ini;
- b) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang melaksanakan MOU dengan Perguruan tinggi se indonesia;
- c) Adanya Koordinasi yang baik antara pimpinan se lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Faktor penghambat:

- a) Belum adanya panduan yang baik dari pihak kementerian terkait program MBKM;
- b) Kurang maksimal dalam Memonitoring Mahasiswa;
- c) Kurangnya informasi terkait program MBKM;
- d) Kurangnya kemampuan adaptasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
- e) Kurangnya dukungan dosen terhadap kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f) Perbedaan Metode / Sistem Pembelajaran.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan

- a) Untuk PT Universitas Negeri Padang
 - Buat kebijakan konversi SKS yang terstandar dan berbasis output, sehingga setiap program MBKM memiliki nilai kredit yang jelas.
 - Sediakan aplikasi berbasis digital untuk memudahkan mahasiswa dan dosen mengajukan dan memonitor proses konversi.

- Perluasan jejaring dengan mitra nasional dan internasional, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan startup.
- Fokus pada kerja sama lintas sektor yang mendukung keunggulan lokal Sumatra Barat, seperti budaya Minangkabau, pariwisata, dan pendidikan.
- Adakan forum rutin antara UNP dan mitra untuk menyelaraskan program MBKM dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

b) Untuk Fakultas Ilmu Sosial UNP

- Buat panduan konversi yang jelas, mencakup bobot SKS untuk setiap jenis kegiatan MBKM (magang, pertukaran pelajar, proyek sosial, dll.)
- Fakultas perlu menjalin lebih banyak kemitraan dengan organisasi pemerintah, LSM, perusahaan, dan komunitas lokal.
- Program kerja sama harus mencakup bidang ilmu sosial seperti pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, dan analisis sosial.

KESIMPULAN

Implementasi program MBKM Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ini telah dilaksanakan dengan menjalankan empat program sebagai berikut Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Kampus Mengajar (KM), Magang / Praktik kerja, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). dari pelaksanaan program tersebut memiliki antusias yang tinggi dari mahasiswa Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang namun terdapat kendala dalam pelaksanaan Program MBKM bagi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang seperti sulitnya dalam melakukan konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti Kegiatan MBKM, kurangnya maksimal dalam memonitoring mahasiswa kegiatan MBKM, kurangnya informasi terkait program MBKM, kurangnya kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dalam melakukan adaptasi lingkungan baru, kurangnya dukungan dewan dosen terhadap kegiatan Merdeka belajar Kampus merdeka , perbedaan metode / sistem pembelajaran.

Rekomendasi penelitian ke depannya. yang ingin mengkaji Implementasi program MBKM ini di berikan 5 saran untuk yang di teliti ke depannya sebagai berikut. Pertama evaluasi kesiapan institusi yang di kaji sejauh mana persiapan fakultas ilmu sosial UNP dalam mendukung dan mengimplementasi program MBKM. Penelitian di lakukan dengan metode studi kasus atau kualitatif dengan analisis dokumen, wawancara, dengan pihak fakultas, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya , Kedua kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM yang di mana penelitian ini tentang tingkat kepuasan mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Penelitian ini menggunakan metode survei kepuasan mahasiswa menggunakan sistem wawancara secara rinci dan mendalam, Ketiga pengaruh MBKM terhadap kualitas pendidikan yang di mana MBKM tersebut memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, menggunakan metode penelitian longitudinal dengan membandingkan hasil akademik mahasiswa sebelum dan sesudah implementasi MBKM , Keempat kesetaraan akses MBKM bagi mahasiswa yang di mana mahasiswa

memiliki kesempatan yang setara dalam mengikuti program MBKM termasuk mahasiswa dari latar belakang yang berbeda dengan menggunakan metode survei atau wawancara untuk memahami kendala yang di hadapi oleh mahasiswa tertentu dalam mengakses program MBKM. Kelima peran dosen dalam peminjaman MBKM yang di mana topiknya menjelaskan analisis tentang peran dosen sebagai pembimbing atau fasilitator dalam pelaksanaan program MBKM dengan Menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan wawancara dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM.

REFERENSI

- Abdurahman, A., Ramadhani, S. D., & Wahyudi, H. (2023). Upaya Peningkatan Melek Teknologi dan Administrasi melalui Program Kampus Mengajar pada SDN Banjarsari 04 Kabupaten Jember. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 131–138. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i3.1451>
- Cakrawala, M., & Halim, A. (2021). Ketercapaian Dan Kendala Implementasi MBKM Di Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang. *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 1017–1024.
- Fauziah, Y., & Vantissha, D. (2021). *Pengaruh Implementasi Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Mahasiswa Di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul* (Vol. 8).
- Hardi, E., Ambiyar, A., & Aziz, I. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Jurusan Sejarah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 421–434. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4500>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. <https://www.researchgate.net/publication/327762798>
- Kemendikbudristek. (2020). *Buku Panduan Merdeka belajar Kampus Merdeka* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2024). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2024*.
- Khoiri Nailurrohmah, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid 19. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.26740/jdmp.v6n1.p1-6>
- Kurniadi, E., Nurzaman, M., & Gusriani, N. (2023). *Desain Kurikulum dan Konversi Hasil Kegiatan MBKM Program Studi Sarjana Matematika*. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i2.2364>
- La, O., Amril, O., Fauziah, S. P., Yoesdiarti, A., Yekstyastuti, R., & Mubarakah, S. L. (2022). Perspektif Dosen, Mahasiswa Dan Tendik Mengenai MbkM Di Universitas Djuanda Bogor. *Jurnal Penjamin Mutu*, 8(2). <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM>
- Mayang Seprilla. (2022, November 18). *Problematika dan Solusi Implementasi Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi*. Sevima. <https://sevima.com/problematika-dan-solusi-implementasi->

- kampus-merdeka-di-perguruan-tinggi/
Nurwadahnia, 2 M. Mabur Haslan, 3 Edy Kurniawansyah, 4 Bagdawansyah Alqadri. (2023). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Meningkatkan Keterampilan dan Kreativitas Belajar Mahasiswa di STKIP Yapis Dompus. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 9.
- Peraturan Rektor UNP Tentang MBKM, Universitas Negeri Padang (2021).
- Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020 Tentang SN-Dikti, Kemendikbud RI (2020).
- Projo, W. A. (2020, January 25). *Alasan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan kampus merdeka*. Kompas TV .
<https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/20283891/4-alasan-nadiem-makarim-mengeluarkan-kebijakan-kampus-merdeka?page=all>
- Puyt, R. W., Lie, F. B., & Wilderom, C. P. M. (2023). The origins of SWOT analysis. *Long Range Planning*, 56(3).
<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2023.102304>
- Sri Dewi Anggadini, Surtikanti, Siti Kurnia Rahayu, Adeh Ratna Komala, Lilis Puspitawati, & Wati Aris Astuti. (2022). Persepsi Mahasiswa Atas Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Lingkungan Prodi Akuntansi UNIKOM. *Jurnal Pendidikan*, 23(1), 64–76.
<https://doi.org/10.33830/jp.v23i1.2563.2022>
- Suryo Budi Santoso*, H. J. A. H. P. N. I. I. M. H. (2022). Studi Implementasi MBKM Pada Mahasiswa, Dosen Dan Mitra Di Tingkat Prodi Manajemen, Akuntansi, Dan Teknik Informatika Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Review Applies Accounting Research*, 2.
- Tandrianingsih, S., & Rohmah, W. (2023). *Implementasi Program Mbkm Sebagai Peningkatan Soft Skill Mahasiswa*. 4, 379–389.
- Undamayanti, E., Iman Hermanto, T., Kaniawulan, I., Studi, P., Informatika, T., Teknologi, S. T., & Purwakarta, W. (2022). Analisis Sentimen Menggunakan Metode Naive Bayes Berbasis Particle Swarm Optimization Terhadap Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. In *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* (Vol. 6, Issue 2).
- Wahyu Sunandayani, N. S., & Mislinawati. (2023). Kendala Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Syiah Kuala Dalam Mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Usk Unggul. *Journal Tunas Bangsa*, 10(2), 71–80.
<https://ejournal.bbg.ac.id/tunasbangsa>.